



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



ISUSUN TAHUN 2022



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No.79 A Telp. (0751)34475-31554
PADANG

BAB I**PENDAHULUAN****1. 1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga disusun dengan memperhatikan Renja Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) dan Renja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat Kabupaten Kota. Pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang telah ditetapkan pada Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 ;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar.
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2023.
22. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 05/SK/SET-BKPol/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b) Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat :

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Pengertian Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dan Renja K/L

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Tahun 2023, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2021) dan capaian Renstra SKPD, analisa kinerja pelayanan SKPD, isu isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kesbangpol

Memuat tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan penunjang yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB V Penutup

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan maupun rencana tindak lanjut.

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA
TAHUN LALU**

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan *rencana* kerja yang ditetapkan dalam APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah tercapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program/kegiatan. Sedangkan laporan keuangan tersebut diatur dalam PP nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output (keluaran), dan outcome (hasil).

Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun berupa non fisik.
3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dapat ditinjau dari 2 aspek yaitu kinerja output dan kinerja keuangan. Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang

telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Untuk kinerja keuangan, dari rancangan renja awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebanyak **6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 12.150.071.914-** (dua belas milyar seratus lima puluh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

Untuk mengukur kinerja output program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Kesbangpol sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.1

**Indikator Kinerja untuk mengukur kinerja output program/kegiatan
Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Target
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (80)
2	Jumlah konflik di Sumbar	<5
3	Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	5%
4	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	76

A. Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Target dan realisasi kinerja output program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja "**Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**" diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel II.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Output Program dan Kegiatan
pada Renja Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja output	Realisasi Kinerja Output	(%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95% (Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi)	95% (Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi)	100
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(100%) Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	(100%) Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen (Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) 1 kali (Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan/Rakor Kesbangpol se- Sumbar)	6 dokumen (Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) 1 kali (Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan/Rakor Kesbangpol se- Sumbar)	100
b.	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6 dokumen (RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	6 dokumen (RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	100
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen (Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan Yang Disusun)	4 dokumen (Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan Yang Disusun)	100
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen (Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan) 1 Dokumen (Dokumen Hasil Monev Kegiatan SKPD)	4 Dokumen (Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan) 1 Dokumen (Dokumen Hasil Monev Kegiatan SKPD)	100

2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan Tertib Administrasi Keuangan	12 bulan Tertib Administrasi Keuangan	100
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	12 bulan (Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan)	12 bulan (Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan)	100
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan (Jasa Administrasi Keuangan)	12 bulan (Jasa Administrasi Keuangan)	100
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan (Laporan Keuangan Akhir Tahun)	1 laporan (Laporan Keuangan Akhir Tahun)	100
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	13 laporan (Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran)	13 laporan (Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran)	100
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan (Tertib Administrasi Baranh Milik Daerah)	12 bulan (Tertib Administrasi Baranh Milik Daerah)	100
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah	5 unit (Jasa jaminan kendaraan dinas operasional)	9 jenis (Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli)	100
b.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan (Laporan asset semesteran) 1 laporan (Laporan asset tahunan)	2 laporan (Laporan asset semesteran) 1 laporan (Laporan asset tahunan)	100
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan (Tertib Administrasi Barang Milik Daerah)	12 bulan (Tertib Administrasi Barang Milik Daerah)	100
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(39 stel) Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	(39 stel) Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	100
b.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	(6 kali) Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilaksanakan dan Yang Diikuti	(6 kali) Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilaksanakan dan Yang Diikuti	100
c.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(12 orang) ASN Kesbangpol yang mengikuti bimtek	(12 orang) ASN Kesbangpol yang mengikuti bimtek	100

5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan (Tertib Administrasi Umum)	12 bulan (Tertib Administrasi Umum)	100
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan (Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia)	12 bulan (Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia)	100
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan (Alat Tulis Kantor Yang Disediakan)	12 bulan (Alat Tulis Kantor Yang Disediakan)	100
		12 bulan (Makanan dan Minuman Yang Disediakan Untuk Pertemuan dan Tamu)	12 bulan (Makanan dan Minuman Yang Disediakan Untuk Pertemuan dan Tamu)	100
c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan (Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan)	12 bulan (Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan)	100
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 jenis (Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan)	5 jenis (Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan)	100
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan (Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah)	12 bulan (Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah)	100
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah)	12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah)	100
a.	Pengadaan Mebel	2 unit (Pengadaan Meubeleur yang diadakan)	2 unit (Pengadaan Meubeleur yang diadakan)	100
b.	Pengadaan Sarana dan Pra Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 unit (Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan)	7 unit (Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan)	100

7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan (Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	12 bulan (Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	100
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 kali (Jumlah surat yang didistribusikan)	100 kali (Jumlah surat yang didistribusikan)	100
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	371 m3 (Rekening tagihan air yang dibayarkan) 12 bulan (Rekening tagihan internet yang dibayarkan) 4000 kwh (Rekening tagihan listrik yang dibayarkan) 1031 menit (Rekening tagihan telepon yang dibayarkan)	371 m3 (Rekening tagihan air yang dibayarkan) 12 bulan (Rekening tagihan internet yang dibayarkan) 4000 kwh (Rekening tagihan listrik yang dibayarkan) 1031 menit (Rekening tagihan telepon yang dibayarkan)	100
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan (Jasa Kebersihan Kantor) 12 bulan (Jasa Pengamanan Kantor) 12 bulan (Jasa Sopir Kantor)	(12 bulan (Jasa Kebersihan Kantor) 12 bulan (Jasa Pengamanan Kantor) 12 bulan (Jasa Sopir Kantor)	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan (Terpeliharanya Barang Milik Daerah)	12 bulan (Terpeliharanya Barang Milik Daerah)	100
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit (Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara)	7 unit (Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara)	100
b.	Pemeliharaan/ Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13 m2 (Gedung Kantor yang Direhab)	13 m2 (Gedung Kantor yang Direhab)	100

c.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Pra Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37 unit (Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara)	37 unit (Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara)	100
----	--	--	--	-----

Adapun realisasi capaian indikator kinerja "**Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**" untuk tahun pertama (tahun 2021) RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.3
Realisasi capaian indikator kinerja "*Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja*"

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun Keenam RPJMD (2021)	Realisasi Kinerja Tahun Keenam RPJMD (2021)	Program Pendukung
I	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (80)	B (70,27)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mendapat nilai 70,27 dengan kategori B (interpretasi BAIK), artinya akuntabilitasnya sudah baik, memiliki sistem yang sudah dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Prediket evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tersebut berdasarkan laporan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor : 04.29/INSP-LAKIP/III-2021 tanggal 30 Maret 2021.

Dari segi capaian kinerja, target indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2020 adalah BB (78), sedangkan realisasinya adalah B (69,74) maka tingkat capaiannya 89,67%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja "**sangat baik.**"

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%), Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), Evaluasi Internal (Bobot 10%), dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (Bobot 20%)

Nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 25,46. Dibandingkan dengan bobot penilaian terhadap perencanaan kinerja yaitu sebesar 30%, tingkat capaian nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar 84,87%. Hasil ini menunjukkan perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sudah baik artinya dokumen perencanaan kinerja secara umum sudah sesuai dengan aturan seperti Renstra telah memuat tujuan dan sasaran strategis, dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran dan telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, perencanaan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja telah disusun dan menyajikan IKU serta telah dipublikasikan pada website <http://kesbangpol.sumbaprov.go.id> dan rencana aksi kinerja sudah ada dan telah mencantumkan target kinerja secara berkala.

Kemudian, dari segi pengukuran kinerja, nilai hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 16,84%. Dibandingkan dengan bobot penilaian terhadap pengukuran kinerja yaitu sebesar 25%, tingkat capaian nilai hasil evaluasi pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar 67,36%. Hasil ini menunjukkan pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan cukup baik karena sudah terdapat pedoman/SOP tentang pengumpulan data kinerja dan IKU Eselon III dan IV telah selaras dengan IKU atasannya. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya belum adanya kejelasan penanggung jawab pengumpul data pada masing-masing bagian/bidang, pengukuran kinerja belum dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi, pengumpulan data kinerja dan rencana aksi belum memenuhi kriteria pengumpulan data yang andal, IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan dalam penilaian keberhasilan atau kegagalan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

Dari segi pelaporan kinerja, nilai hasil evaluasi pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 10,78. Jika dibandingkan dengan bobot pelaporan kinerja yaitu sebesar 15%, nilai hasil evaluasi pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, tingkat capaiannya sebesar 71,87%. Hasil ini menunjukkan pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sudah baik. Hal ini disebabkan karena laporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu serta telah diunggah ke website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, laporan kinerja telah menyajikan informasi pencapaian IKU, evaluasi dan analisis capaian kinerja, perbandingan data capaian dengan tahun sebelumnya dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta realisasi anggaran dalam melaksanakan program kegiatan.

Selanjutnya, dari segi evaluasi internal, nilai evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 6,19. Jika dibandingkan dengan bobot evaluasi internal yaitu sebesar 10%, tingkat capaian nilai evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar 62%. Hasil ini menunjukkan evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikatakan cukup baik karena sudah ada SOP evaluasi kinerja internal yang digunakan untuk memantau kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya belum adanya pemantauan terhadap rencana aksi dan belum memberikan alternative solusi untuk perbaikan capaian kinerja setiap periodenya dan belum adanya dokumen yang memadai terhadap penyampaian hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sehingga hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang nyata.

Terakhir, dari segi pencapaian sasaran/kinerja organisasi, nilai evaluasi terhadap pencapaian sasaran/kinerja organisasi sebesar 11,00. Jika dibandingkan dengan bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi yaitu sebesar 20%, capaiannya sebesar 55%. Angka ini menunjukkan pencapaian sasaran/kinerja organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan cukup karena hasil pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat rata-rata capaiannya lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun, belum terdapat inovasi dalam manajemen kinerja.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol tahun 2021 antara lain :

1. Penyajian dokumen Renstra lebih lengkap dan sesuai dengan regulasi yang ada. Renstra yang disusun sudah memuat tujuan dan sasaran strategis dan telah ditetapkan target untuk masing-masing indikator tujuan dan sasaran. Dokumen Renstra juga telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran dan telah dimonitoring pencapaiannya secara berkala.
2. Dokumen yang menjadi penilaian dalam evaluasi SAKIP diantaranya Renstra, Perencanaan Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan IKU telah dipublikasikan melalui website <http://kesbangpol.sumbarprov.go.id>.
3. Sudah terdapat SOP tentang pengumpulan data kinerja Sudah ada rencana aksi atas kinerja yang diperjanjikan dan telah mencantumkan target secara periodik/triwulan, dan dimonitor pencapaianannya secara berkala setiap triwulan.
4. Telah disusunnya SOP evaluasi kinerja internal yang digunakan untuk melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Meskipun capaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikatakan sudah baik, namun capaian kinerja untuk indikator ini belum mencapai target 100%. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol untuk meningkatkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
2. Mengintensifkan rapat internal di lingkungan SKPD untuk mengevaluasi capaian kinerja masing-masing aparatur serta mengantisipasi kendala atau gangguan yang dapat menghambat pencapaian kinerja masing-masing aparatur.
3. Mengevaluasi keselarasan semua dokumen perencanaan sampai ke tingkat bawah.
4. Melengkapi segala bentuk dokumen yang dibutuhkan dalam evaluasi SAKIP diantaranya rencana aksi beserta pencapaiannya setiap triwulan, perjanjian kinerja beserta target indikatornya sampai jenjang staf, dan dokumen lainnya.
5. Mengupayakan adanya reward dan punishment bagi aparatur dalam pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kinerja masing-masing pegawai.
6. Melakukan update dan revisi terhadap dokumen-dokumen yang perlu dilakukan

penyesuaian.

B. Indikator Kinerja Jumlah Konflik di Sumbar

Target dan realisasi output program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja "**Jumlah Konflik di Sumbar**" dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.4
Perbandingan Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021
yang mendukung pencapaian indikator kinerja
"Jumlah Konflik di Sumbar"

No	Program/ Kegiatan	Target kinerja output	Realisasi Kinerja Output	%
1	2	3	4	5
I.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik sosial	23 kasus (Konflik Sosial)	0 kasus (Konflik Sosial)	200
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	(80%) Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat	(100%) Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat	125
a.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	19 kab/kota (Koordinasi dan pengumpulan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah) 4 kali (Rapat Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah) 4 kali (Rapat Pemantauan Orang Asing) 4 kali (Rapat Timdu Penanganan	19 kab/kota (Koordinasi dan pengumpulan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah) 4 kali (Rapat Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah) 4 kali (Rapat Pemantauan Orang Asing) 4 kali (Rapat Timdu Penanganan	100

		Konflik Sosial (PKS) 4 kali (Rapat tim FKDM)	Konflik Sosial (PKS) 4 kali (Rapat tim FKDM)	
b.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 buku (Buku pemetaan potensi konflik di daerah) 3 laporan (Laporan rencana aksi) 19 kab/kota (Monitoring keberadaan orang asing di daerah) 19 kab/kota (Monitoring masalah strategis daerah) 19 kab/kota (Monitoring potensi konflik sosial di daerah) 19 kab/kota (Monitoring potensi penyebaran radikalisme dan potensi aksi teror di daerah) 19 kab/kota (Monitoring Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab/kota)	1 buku (Buku pemetaan potensi konflik di daerah) 3 laporan (Laporan rencana aksi) 19 kab/kota (Monitoring keberadaan orang asing di daerah) 19 kab/kota (Monitoring masalah strategis daerah) 19 kab/kota (Monitoring potensi konflik sosial di daerah) 19 kab/kota (Monitoring potensi penyebaran radikalisme dan potensi aksi teror di daerah) 19 kab/kota (Monitoring Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab/kota)	100
c.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	19 kab/kota (Monitoring isu strategis di daerah dan pelaksanaan Forkopimda Kab/Kota) 2 kali (Rakor Forkopimda) 2 kali (Rapat tim Forkopimda)	19 kab/kota (Monitoring isu strategis di daerah dan pelaksanaan Forkopimda Kab/Kota) 2 kali (Rakor Forkopimda) 2 kali (Rapat tim Forkopimda)	100
II.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0 kasus (Konflik SARA)	0 kasus (Konflik SARA)	100

1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80% (Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu separatisme di daerah)	100% (Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu separatisme di daerah)	125
a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	100% (Hibah DHD 45 yang Terealisasi) 3 kali (Pendidikan Wawasan Kebangsaan) 3 kali (Sosialisasi Pembauran Kebangsaan)	100% (Hibah DHD 45 yang Terealisasi) 3 kali (Pendidikan Wawasan Kebangsaan) 3 kali (Sosialisasi Pembauran Kebangsaan)	100
b.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1 kali (Rapat tim Forum Pembauran Kebangsaan)	1 kali (Rapat tim Forum Pembauran Kebangsaan)	100
c.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	19 kab/kota (Monitoring Permasalahan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di Daerah) 2 kali (Rapat Tim)	19 kab/kota (Monitoring Permasalahan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di Daerah) 2 kali (Rapat Tim)	100

Adapun realisasi capaian indikator kinerja **"Jumlah Konflik di Sumbar"** untuk tahun keempat (tahun 2021) RPJMD Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.5
Realisasi capaian indikator kinerja “Jumlah Konflik di Sumbar”
Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2021)	Realisasi Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2021)	Program Pendukung
I	Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah konflik di Sumbar	<5	0	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2021 terdapat 95 potensi konflik yang terdata di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang terdiri dari potensi konflik Sumber Daya Alam sebanyak 12 kasus, lahan 30 kasus, perbatasan kabupaten/kota 9 kasus, perbatasan nagari 9 kasus, Ekopolosbud 21 kasus dan SARA 14 kasus. Dari 95 potensi konflik tersebut, terdapat tidak konflik yang menimbulkan bentrokan atau kekerasan di tengah masyarakat.

Dalam rangka pencegahan konflik di Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan berbagai upaya diantaranya meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat, dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.

Dalam meredam potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera

Barat telah berupaya mengintensifkan peran tim dan forum-forum strategis daerah diantaranya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sepanjang tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat tim TKDPD sebanyak 2 kali rapat, rapat tim POA sebanyak 2 kali rapat, rapat Timdu PKS sebanyak 3 kali rapat, rapat tim FKDM sebanyak 3 kali rapat, rapat tim FKUB sebanyak 4 kali rapat, rapat tim FPK sebanyak 2 kali rapat dan rapat Forkopimda sebanyak 8 kali rapat. Tim dan forum-forum strategis ini dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah dan difasilitasi pembentukannya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Peran dari tim dan forum-forum strategis ini diantaranya :

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah.
2. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini.
3. Mengkoordinasikan langkah-langkah pengamanan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
4. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Memberikan laporan informasi serta rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Selain mengintensifkan peran dan fungsi tim forum strategis daerah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga melakukan dialog antar kelompok masyarakat, membangun karakter bangsa dan melestarikan nilai Pancasila dan kearifan local melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

Untuk membangun sistem peringatan dini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya diantaranya pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat secara damai dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Dengan upaya-upaya tersebut, potensi-potensi konflik di tengah masyarakat di Sumatera Barat dapat diredam dan tidak berujung pada konflik yang bersifat anarkisme atau menimbulkan bentrokan/kekerasan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target indikator kinerja jumlah konflik di Sumbar yaitu 0 kasus. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya dukungan beberapa SKPD dan instansi terkait serta jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi sehingga pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik dan Pemulihan pascakonflik dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
3. Meningkatnya intensitas pertemuan dengan jajaran Forkopimda Sumbar dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
4. Terjalinnnya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai

permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

5. Tersedianya buku pemetaan potensi konflik yang disusun sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor. Buku pemetaan potensi konflik mencakup gambaran potensi konflik per kabupaten/kota beserta analisis terhadap potensi dimaksud. Buku ini juga menggambarkan dominasi jenis potensi konflik di Sumbar serta rekapitulasi seluruh potensi konflik dalam satu tahun, yang bisa dijadikan pedoman pengelolaan potensi konflik di tahun mendatang.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Masih terbatasnya jumlah intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.
2. Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan khususnya anggaran untuk pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk di daerah
3. Masih lemahnya sistem pelaporan dari beberapa SKPD dan kabupaten dan kota dalam penyusunan rencana aksi timdu penanganan konflik sosial sehingga kualitas dokumen rencana aksi timdu penanganan konflik sosial belum maksimal
4. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol di daerah dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar diantaranya :

1. Memaksimalkan fungsi intelijen yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.
2. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk di daerah
3. Melakukan pembinaan secara intensif kepada anggota tim terpadu penanganan konflik sosial dalam penyampaian laporan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial secara periodik.

C. Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar

Adapun target dan realisasi kinerja output program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja "**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar**" dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.6
Perbandingan Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021
yang mendukung pencapaian indikator kinerja
"Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar".

No	Program/ Kegiatan	Target kinerja output	Realisasi kinerja output	%
1	2	3	4	5
I	Program Pembinaan dan Pengemba- ngan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	70% (Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat)	53,93% (Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat)	77,04
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	80% (Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat)	110% (Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat)	125

a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 kali (Sosialisasi tentang P4GN)	8 kali (Sosialisasi tentang P4GN)	100
b.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 kali (Dialog Tokoh Masyarakat dalam Pra Kelembagaan) 2 kab/kota (Dialog Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Pra Kelembagaan FKUB) 19 kab/kota (Koordinasi dan Pengumpulan Informasi terhadap upaya peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah) 4 kali (Rakor Tim FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)) 4 kali Rapat Periodek Kesbangpol dg Pengurus FKUB	2 kali (Dialog Tokoh Masyarakat dalam Pra Kelembagaan) 2 kab/kota (Dialog Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Pra Kelembagaan FKUB) 19 kab/kota (Koordinasi dan Pengumpulan Informasi terhadap upaya peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah) 4 kali (Rakor Tim FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)) 4 kali Rapat Periodek Kesbangpol dg Pengurus FKUB	100

c.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	19 kab/kota (Monitoring Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat, Monitoring Perkembangan Kasus Maksiat di Daerah Monitoring potensi Konflik akibat gejolak ekonomi di Sumbar dan Monitoring potensi konflik antar Umat Beragama)	19 kab/kota (Monitoring Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat, Monitoring Perkembangan Kasus Maksiat di Daerah Monitoring potensi Konflik akibat gejolak ekonomi di Sumbar dan Monitoring potensi konflik antar Umat Beragama)	100
----	---	--	--	-----

Realisasi capaian indikator kinerja **"Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar"** untuk tahun keenam (tahun 2021) RPJMD Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.7
Realisasi capaian indikator kinerja
"Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar " Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2021)	Realisasi Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2021)	Program Pendukung
I	Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase angka kriminalitas di Sumbar	5%	29,06%	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Berdasarkan uraian tabel diatas, diketahui bahwa persentase penurunan angka kriminalitas untuk tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 adalah sebesar 29,06%. Angka ini melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 5%. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar tahun 2021 diukur dari perbandingan jumlah angka kriminalitas yang terjadi di Sumbar tahun 2020 yang direlease pada tahun 2021 dengan jumlah angka kriminalitas yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun sebelumnya. Kasus-kasus kejahatan di Sumbar yang menjadi tolak ukur dalam perhitungan angka kriminalitas tersebut diantaranya kasus pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pembakaran/kebakaran, perkosaan, pembunuhan, penipuan, perusakan, kejahatan terkait narkoba dan psikotropika dan kasus penganiayaan. Sumber data diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas dan fungsi melakukan upaya preventif terhadap penyebaran kasus maksiat termasuk penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Peningkatan kasus maksiat termasuk angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat dapat memicu tingginya angka kriminalitas di Sumatera Barat.

Kriminalitas merupakan suatu pola mengenai tingkah laku yang dapat merugikan masyarakat (atau bisa disebut korban) berupa reaksi formal, informal, dan nonformal. Pengertian kriminalitas secara umum juga sebagai tindakan dimana dalam perbuatannya yaitu melanggar hukum dan aturan serta norma norma sosial di dalam suatu lingkungan masyarakat, sehingga dampak kriminalitas sendiri bisa jadi berupa penentangan dari masyarakat. Salah satu bentuk kriminalitas yang terjadi di Sumatera Barat adalah kejahatan terkait narkoba dan psikotropika yang kasusnya cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan peran dari pemerintah daerah agar kasus kejahatan terkait narkoba dan psikotropika di Sumatera Barat dapat berkurang jumlahnya dari tahun ke tahun.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa

dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berperan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui kegiatan sosialisasi/ pembekalan kepada masyarakat terkait P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dan kasus maksiat lainnya, melakukan deteksi dini, penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pada tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sosialisasi P4GN bagi 650 orang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan generasi muda di Sumatera Barat sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan upaya deteksi dini dengan berkoordinasi dengan instansi terkait (BNN) dalam memberantas kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat. Dengan upaya ini, diharapkan kasus maksiat di Sumatera Barat dapat berkurang dan berdampak pada penurunan angka kriminalitas di Sumatera Barat.

Angka kriminalitas di Sumbar dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan dari 8.093 kasus menjadi 5.741 kasus. Adapun perbandingan jumlah kenaikan atau penurunan masing-masing kasus tersebut dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.8
Perbandingan Angka Kriminalitas di Sumbar Tahun 2020 dan 2021

No	Kasus	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Curat	2.051	1.416
2	Curas	267	176
3	Curanmor	2186	902
4	Pembakaran/Kebakaran	80	67
5	Perkosaan	30	31
6	Pembunuhan	16	20
7	Penipuan	590	415
8	Perusakan	265	192
9	Kejahatan terkait narkoba dan psikotropika	826	874
10	Penganiayaan	1782	1648
Total		9.236	5.741

Penurunan angka kriminalitas di Sumbar pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan tindakan preventif terhadap peningkatan kasus kriminalitas di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait Pencegahan dan PemberantasanPenyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba khususnya bagi pelajar dan generasi muda.
2. Adanya Perda tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yaitu Perda No 9 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 5 April 2019 sebagai tindak lanjut Permendagri No 21 tahun 2013. Perda ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan Napza di Sumbar dengan memaksimalkan peran dari pemerintah daerah baik dalam bentuk antisipasi dini, pencegahan, fasilitas rehabilitasi, pengawasan dan pelaporan serta partisipasi masyarakat.
3. Adanya koordinasi dengan aparat kepolisian, Satpol PP, penegak hukum dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Sumbar

Dalam meningkatkan capaian kinerja indikator persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar, terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Tidak tersedianya alokasi anggaran untuk mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait bahaya perbuatan maksiat dan penyalahgunaan narkoba akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 di Sumatera Barat.
2. Belum terimplementasinya Inpres No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 karena belum didukung oleh anggaran.

Untuk menghadapi hambatan di atas, solusi atau upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat untuk pencapaian indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas diantaranya pemanfaatan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kepolisian, Satpol PP, TNI dan jajaran Kesbangpol Provinsi serta tokoh-tokoh masyarakat, (alim ulama, tokoh pemuda, tokoh adat) untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap kasus maksiat, penyalahgunaan narkoba dan kasus kriminalitas lainnya.

D. Indikator Kinerja Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar

Target dan realisasi kinerja output program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja “**Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar**” dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.9
Perbandingan Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021
yang mendukung pencapaian indikator kinerja
“Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar”.

No	Program/ Kegiatan	Target kinerja output	Realisasi kinerja output	(%)
1	2	3	4	5
I	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	68,31 (Peningkatan Capaian IDI)	73 (Peningkatan Capaian IDI)	106,87
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	80% (Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis)	100% (Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis)	125
a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	100% (Hibah Bantuan Keuangan Parpol yang terealisasi)	100% (Hibah Bantuan Keuangan Parpol yang terealisasi)	100

	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 partai politik (Jumlah Partai Politik yang di verifikasi) 540 peserta (Pendidikan Politik Masyarakat) (100%) Verifikasi Berkas Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota	9 partai politik (Jumlah Partai Politik yang di verifikasi) 540 peserta (Pendidikan Politik Masyarakat) (100%) Verifikasi Berkas Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota	
b.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	(19 kab/kota) Monitoring Perkembangan Politik Daerah	(19 kab/kota) Monitoring Perkembangan Politik Daerah	100
II	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80% (Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas)	80% (Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas)	100
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80% (Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormbertentangan dengan peraturan yang berlaku)	80% (Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormbertentangan dengan peraturan yang berlaku)	100
a.	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan	100% (Hibah PWRI yang terealisasi) 2 kali	100% (Hibah PWRI yang terealisasi) 2 kali	100

	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	(Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Ormas)	(Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Ormas)	
b.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	19 kab/kota (Monitoring keberadaan dan aktivitas ormas di Daerah)	19 kab/kota (Monitoring keberadaan dan aktivitas ormas di Daerah)	100

Relisasi capaian indikator kinerja “**Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar**” untuk tahun keenam (tahun 2021) RPJMD Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.10
Realisasi capaian indikator kinerja
“Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar ” Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2021)	Realisasi Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2021)	Program Pendukung
I	Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat	76	73	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh Pemerintah. Pembangunan demokrasi memerlukan data yang empiric untuk dapat dijadikan landasan kebijakan dan merumuskan strategi yang spesifik dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun untuk mengukur tingkat pencapaian baik ditingkat daerah maupun di tingkat pusat bukanlah sesuatu yang mudah.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) *review* surat kabar lokal, (2) *review* dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif perkembangan demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi, yang berasal dari kinerja Pemerintah/Birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab semua stakeholder dan tidak hanya Pemerintah saja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu instansi yang ikut berperan penting dalam meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar khususnya terhadap perkembangan aspek hak-hak politik (*political right*). Terdapat beberapa indikator yang menjadi penilaian dalam aspek hak-hak politik yang membutuhkan peran dari Kesbangpol untuk peningkatan nilai tersebut diantaranya Indikator "Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu,

hak memilih atau dipilih masyarakat terhamba, kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih, dan Kualitas DPT”

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melakukan pendidikan politik secara berkesinambungan untuk menciptakan etika dan budaya politik yang demokratis dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Selain itu, adanya peran tim pemantauan perkembangan politik yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan dapat memfasilitasi semua kebutuhan sarana pra sarana termasuk logistik yang dibutuhkan saat Pemilu dan dapat mengurangi kecurangan-kecurangan atau segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu. Pada tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pendidikan politik bagi 540 orang yang berasal berbagai unsur diantaranya dari tokoh perempuan, generasi muda, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Dengan upaya ini, diharapkan indikator yang merupakan bagian dari aspek hak-hak politik dapat meningkat dan nantinya akan berpengaruh terhadap nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat.

Pada table II.10, menunjukkan nilai IDI di Sumbar tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 adalah **73**. Angka ini merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan rata-rata di Sumatera Barat 66,59; aspek hak-hak politik sebesar 66,80; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 90,91. Secara lebih rinci, distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi di Sumatera Barat yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil, mengalami kenaikan 10,01 poin, aspek hak-hak politik mengalami kenaikan 5,74 poin, namun aspek lembaga demokrasi mengalami penurunan sebesar 1,3 poin. Hal ini menggambarkan tingkat dinamika demokrasi di Sumatera Barat. Perbaikan iklim berdemokrasi di Sumatera Barat terjadi di aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik, yang secara tidak langsung menggambarkan perbaikan dalam kebebasan masyarakat dan hak-hak politik di Sumatera Barat.

Perkembangan indeks aspek, variabel dan skor indikator Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.11
Perkembangan Indeks Aspek, Variabel dan Skor Indikator Tahun 2019 – 2020

ASPEK/VARIABEL /INDIKATOR		2019	2020
	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA	67,69	73
A	KEBEBASAN SIPIL	56,58	66,59
I	Kebebasan berkumpul dan berserikat	4,69	100
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	0	100
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	37,50	83,33
II	Kebebasan berpendapat	72,23	69,42
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	66,67	83,33
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100	0
III	Kebebasan berkeyakinan	45,20	47,67
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	26,09	26,09
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	78,13	100
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100	100
IV	Kebebasan dari diskriminasi	96,53	100
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100	100
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	87,50	100
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100	100
B	HAK-HAK POLITIK	61,06	66,80
V	Hak memilih dan dipilih	74,87	74,87
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	94,23	94,23
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	94,93	94,93
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	74,19	74,19
14	Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turn out)	78,78	78,78
15	Perempuan terpilih di DPRD Provinsi	20,50	20,50
VI	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	47,25	58,73
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	56,52	41,30

17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	37,98	76,15
C	LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI	92,21	90,91
VII	Pemilu yang bebas dan adil	90,28	90,28
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	81,82	81,82
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	98,73	98,73
VIII	Peran DPRD	79,04	72,44
20	Skor alokasi anggaran pendidikan	100	100
	Skor alokasi anggaran kesehatan		
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	58,82	25,00
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	21,43	14,29
IX	Peran Partai Politik	100	100
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	100	100
24	Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100	100
X	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	90,38	90,38
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	78,95	78,95
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	100	100
XI	Peran Peradilan Yang Independen	100	100
27	Keputusan hakim yang controversial	100	100
28	Penghentian penyidikan yang controversial oleh jaksa atau polisi	100	100

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terdapat empat variabel IDI Sumatera Barat yang mengalami peningkatan, dua variabel mengalami penurunan dan lima variabel tidak mengalami perubahan. Dari empat variabel yang mengalami peningkatan, peningkatan tertinggi terjadi pada variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yang naik sebesar 95,31 poin; diikuti oleh variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan sebesar 11,48 poin, Kebebasan dari Diskriminasi sebesar 3,47 dan variabel Kebebasan Berkeyakinan sebesar 2,47. Dua variabel yang mengalami penurunan adalah variabel Peran DPRD, dimana terjadi penurunan 6,60 poin dan variabel Kebebasan Berpendapat turun sebesar 2,81 poin. Sedangkan lima variabel (Hak Memilih dan Dipilih, Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peran Peradilan yang Independen) tidak mengalami perubahan atau tetap.

Dari sisi indikator, terdapat 18 indikator yang terkategori "baik" (indikator dengan skor di atas 80), yaitu indikator 1-3, 6-12, 18-20, 23-24, dan 26-28. Kendati demikian, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi yang berkategori "buruk" (skor di bawah 60) . Berbagai indikator tersebut memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik. Sejumlah indikator yang termasuk dalam kategori "buruk" adalah indikator 4, 5, 15,

16, 21 dan 22.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya koordinasi yang intensif dengan instansi dan pihak-pihak terkait untuk mendorong peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar.
2. Adanya peran tim pemantauan perkembangan politik daerah untuk melakukan pemantauan sekaligus menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini terhadap persoalan politik yang berkembang di tengah masyarakat
3. Meningkatnya kegiatan pendidikan politik masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan sebagai upaya menciptakan etika dan budaya politik yang demokratis

Adapun solusi atau alternatif yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol untuk peningkatan capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar antara lain :

1. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, Badan Kesbangpol berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu melakukan pemantauan pada setiap tahapan Pemilu. Tahapan pelaksanaan Pemilu tersebut diantaranya :
 - a. Pembentukan/Pengangkatan dan Bimbingan Teknis PPK dan PPS
 - b. Pemutakhiran data dan daftar pemilih
 - c. Pencalonan
 - d. Kampanye
 - e. Pemungutan dan Perhitungan Suara
 - f. Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara
2. Melakukan penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui rapat tim Pokja IDI dengan melibatkan pihak-pihak terkait
3. Melakukan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula dan perempuan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dalam rangka menaikkan indikator pada aspek hak-hak politik

Dari penjelasan di atas, realisasi kinerja keuangan dan output untuk keseluruhan program yang tertuang pada Renja Badan Kesbangpol tahun 2023 yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol secara umum dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.12
Capaian Kinerja Keuangan dan Output Keseluruhan Program pada Renja 2021
untuk mendukung Capaian IKU Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program Pendukung	Realisasi Keuangan	
						Fisik (%)	Keu (%)
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB (80)	B (70,27)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	98,93
2.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah konflik di Sumbar	<5	0	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100	99,66
		Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	5%	29,06%	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	98,65
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100	98,23
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76	73	Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta	100	99,64

					Budaya Politik	100	91,57
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		

Dari tabel di atas disimpulkan hal hal sebagai berikut :

- Pada tahun 2021, semua program (6 program) tercapai outputnya 100% sebagaimana yang ditargetkan.
- Untuk capaian indikator sasaran nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2021 belum mencapai target. Target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2021 adalah BB (80), sedangkan realisasinya adalah B (70,27).
- Untuk indikator sasaran jumlah konflik di Sumbar tahun 2021, capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Target jumlah konflik di Sumbar tahun 2021 adalah kurang dari 5 kasus, sedangkan realisasinya adalah 0 kasus. Untuk indikator sasaran persentase penurunan angka kriminalitas tahun 2021, capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Target persentase penurunan angka kriminalitas tahun 2021 adalah sebesar 5%, sedangkan realisasinya adalah 29,06%.
- Untuk capaian indikator sasaran nilai IDI Sumatera Barat belum mencapai target yang ditetapkan. Target nilai IDI Sumbar tahun 2021 adalah 76, sedangkan realisasinya adalah 73 (level demokrasi sedang).

2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2022

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Renja Tahun 2022, yang mencakup alokasi anggaran program dan kegiatan tahun 2022 sesuai dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.27.889.190.000,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). yang mendukung **6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan**. Adapun gambaran perkiraan capaian Renja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2022 dijelaskan pada table berikut :

Tabel II.13
Gambaran perkiraan capaian Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Target Tahun 2022 (tahun kedua Renstra)	Perkiraan Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%
3	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial. 2. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100% 100% 100%	100% 100% 100%
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan	100%	100%

			Pengembangan Etika serta Budaya Politik 2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	100%	100%
--	--	--	---	------	------

Untuk perkiraan capaian tahun 2022, seluruh program belanja langsung pokok yang terdiri dari satu program, diperkirakan dapat dicapai sebesar 100%. Sedangkan untuk program belanja langsung urusan yang terdiri dari lima program, diperkirakan dapat dicapai sebesar 100%, sesuai dengan target tahun keenam dalam Renstra 2021 – 2026.

Adapun perkiraan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sesuai target RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.14
Perkiraan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2022 sesuai target RPJMD Prov. Sumbar
Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun Keenam RPJMD (2021)	Program Pendukung
1.	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	73,64 84%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3 kasus	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial.

					2. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,01	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas

2.1.3 Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sinkronisasi terhadap sasaran strategis serta indikator kinerja antara dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 telah diupayakan konsisten satu sama lainnya.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Kesbangpol tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Badan Kesbangpol Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022. Tercapai atau tidaknya target Renstra yang telah ditetapkan didasarkan pada realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Tahun 2022. Adapun realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan tahun sebelumnya (tahun 2020) dikaitkan dengan target Renstra sebagaimana yang tertuang dalam laporan kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2021 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.15
Realisasi Program Kegiatan Pelaksanaan Renja dikaitkan dengan Renstra
Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2021	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Program Yang Mendukung Sasaran
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB (80)	B (69,94)	B (70,27)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.	Meningkatnya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Jumlah konflik di Sumbar Persentase penurunan angka kriminalitas	<5 5%	1 12,37%	0 29,06%	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial. 2. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

3.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat.	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumbar	76	67,69	73	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas
----	--	---	----	-------	----	---

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari pemaparan di atas di antaranya :

1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Pada tahun 2021, semua program/ kegiatan tingkat realisasi kinerja outputnya mencapai 100% sesuai dengan yang ditargetkan.

2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Pada tahun 2021, semua program/kegiatan mencapai realisasi target kinerja 100%.

3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan

Pada tahun 2021, tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan evaluasi, secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain :

1. Ada kegiatan yang sifatnya tergantung pada ada/tidaknya konflik yang terjadi
2. Ada kegiatan yang anggarannya di perubahan anggaran sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran karena terbatasnya waktu
3. Ada kegiatan yang pelaksanaannya tergantung dari permintaan stakeholder sehingga realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan.
4. Adanya perubahan kewenangan tupoksi Kesbangpol sehingga kegiatan yang sudah

direncanakan tidak bisa dilaksanakan.

5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul akibat tidak tercapainya target kinerja program /kegiatan terhadap target capaian program Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Apabila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Dalam upaya pencapaian sasaran target kinerja ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan besaran anggaran tahun berikutnya harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Pencapaian Renstra Tahun 2021 dapat dilihat pada Formulir E.55

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam Perda tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai peraturan perundang-undangan mengenai

pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2020 Pasal 2 yang menyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pendidikan politik dalam negeri dalam kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

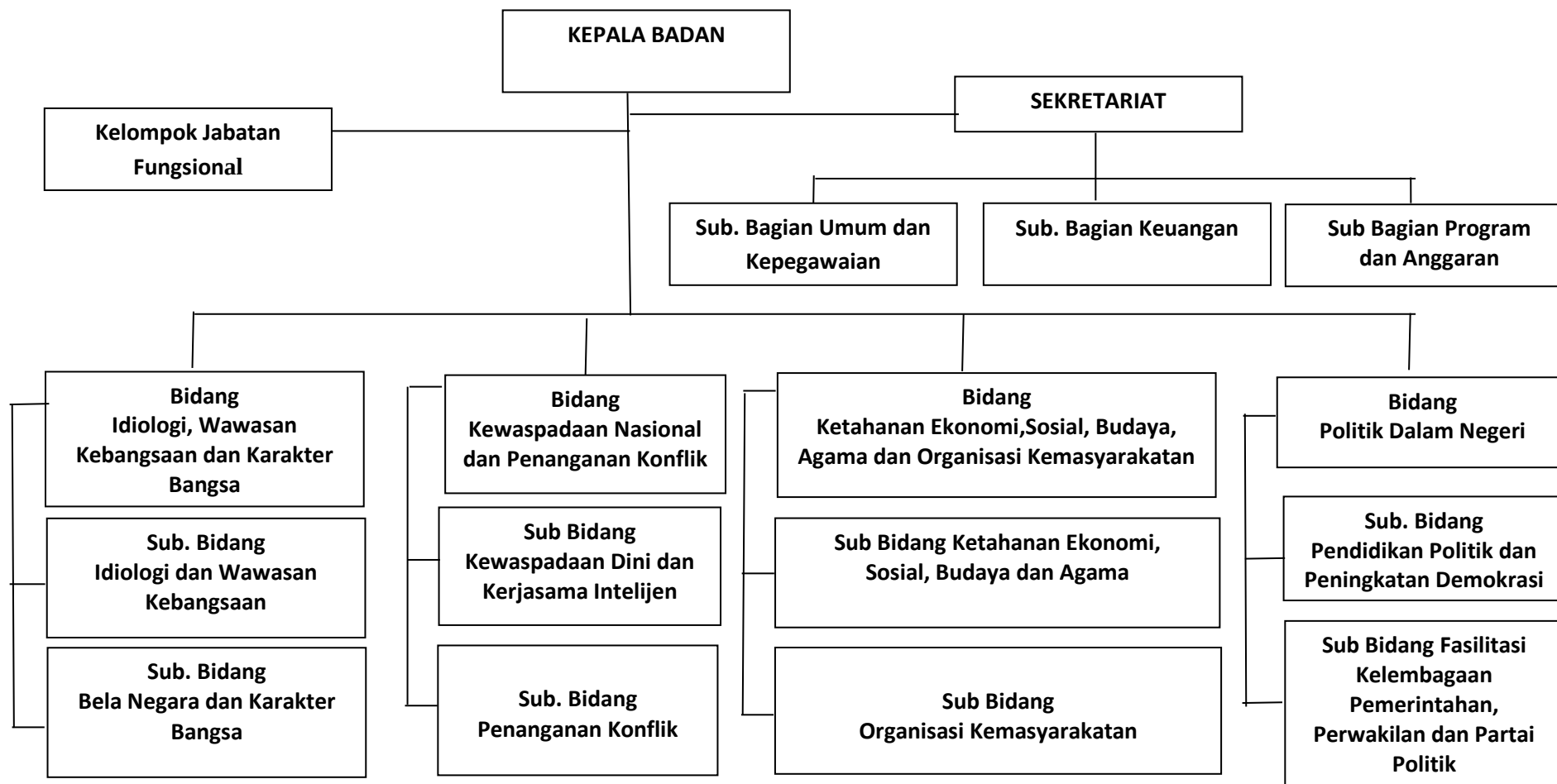
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun

2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program dan Anggaran
3. Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 - 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
 - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
6. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
 - 2) Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi tersebut dapat dapat digambarkan pada bagan berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat



Berdasarkan tugas dan pokok dan fungsi di atas, untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat 2 (dua) indikator kinerja kunci (IKK) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yaitu kegiatan pembinaan politik di daerah dan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP..

Pada umumnya, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021-2026 terus mengalami perbaikan di seluruh aspek yaitu :

1. Terlaksananya dialog politik bersama parpol, ormas dan tokoh masyarakat
2. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi
3. Terlaksananya pemantauan (monitoring) pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
4. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap ormas
5. Terlaksananya sosialisasi undang-undang dan peraturan bidang politik
6. Terlaksananya bimtek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
7. Terlaksananya Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
8. Terpenuhinya jumlah keanggotaan (kursi) DPRD kabupaten/kota di Sumbar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendukung dengan tugas dan fungsinya, seperti tercantum pada tabel berikut :

Tabel II.16
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Hasil penilaian akuntabilitas kinerja (AKIP) Badan Kesbangpol Prov.Sumbar yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Inspektorat

2	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah konflik sosial di Sumbar	Jumlah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, antaretnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat, dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha, atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.	Badan Kesbangpol
		2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	Rasio penurunan angka kriminalitas di Sumbar pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.	Polda Sumbar
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	Nilai yang menunjukkan tingkat/kualitas Demokrasi di Sumbar	Badan Pusat Statistik

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

2.3.1 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol dan hal kritis terkait dengan pelayanan.

Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik berimplikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang membaik, kepuasan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata public. Pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai jenis layanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pengaduan dan keluhan baik yang disampaikan langsung kepada institusi unit pelayanan maupun media cetak atau elektronik. Di sisi lain, masyarakat sendiri pun belum memberi kontrol yang efektif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Karenanya untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya-upaya peningkatan public terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari segi aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas.

Ditinjau dari sinergitas program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar dalam rangka pencapaian pembangunan, program kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dengan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar maupun instansi kesbangpol kabupaten/kota belum seluruhnya sinergis.

Sesuai dengan Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2021 memiliki 1 program yang dijabarkan ke dalam 6 kegiatan. Program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang tertuang dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah **"Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum"** dengan sasaran program yaitu **meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya; terpeliharanya kerukunan**

komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Program ini dijabarkan ke dalam 6 kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan.
- b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik.
- c. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik.
- e. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Untuk mendukung program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- c. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- e. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- f. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Dilihat dari sinergitas program kegiatan, secara umum sudah terwujud sinergitas program dan kegiatan antara Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Namun, untuk Kesbangpol Kabupaten/Kota, terdapat 10 dari 19 kabupaten/kota yang program kegiatannya tidak terakomodir untuk mendukung program pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diantaranya Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan untuk 9 kabupaten/kota yang lain, program dan kegiatannya sudah sinergis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Tabel II.17
Sinergitas perencanaan/pelaksanaan program kerja bidang kesatuan bangsa dan politik, antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.

No	Kabupaten/ Kota	Sinergitas program/ kegiatan dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Kota Padang		√	Belum ada program yang mendukung kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap ormas, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
2	Kabupaten Padang Pariaman		√	Belum ada program yang mendukung kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap ormas, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,serta politik dalam negeri
3	Kota Pariaman		√	Belum ada program yang mendukung kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi dan budaya, bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan
4	Kota Padang Panjang		√	Belum ada program yang mendukung ketahanan ekonomi dan budaya,
5	Kota Bukittinggi	√		
6	Kabupaten	√		

	Agam			
7	Kabupaten Tanah Datar	√		
8	Kota Payakumbuh	√		
9	Kabupaten 50 Kota	√		
10	Kabupaten Solok		√	Belum ada program yang mendukung ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
11	Kota Solok	√		
12	Kabupaten Sijunjung		√	Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas
13	Kota Sawahlunto		√	Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas
14	Kabupaten Pesisir Selatan	√		
15	Kabupaten Kepulauan Mentawai		√	Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas
16	Kabupaten Pasaman	√		
17	Kabupaten Dhamasraya		√	Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dan kewaspadaan nasional
18	Kabupaten Solok Selatan	√		
19	Kabupaten Pasaman Barat		√	Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

Pada dasarnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan implementasi dari tupoksi dan kewenangan yang ada dengan mensinergikan pada kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui capaian visi dan misi. Semua tujuan dan

sasaran serta indikator kinerja program dan kegiatan diarahkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat saja tetapi perlu dukungan dari semua SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terealisasinya tujuan dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Dinamika masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan lingkungan kerja yang ada menuntut percepatan dalam penyelesaian masalah. Apabila permasalahan tersebut baik internal maupun eksternal tidak teratasi akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut :

1. Hambatan Internal

a. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM

Kondisi ini terjadi disebabkan kurangnya SDM yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan kurangnya perputaran pegawai yang seharusnya dapat menjadi penyegaran dan pengalaman serta alat mengasah kemampuan. Secara kuantitas juga kurang memadai sehingga percepatan penyelesaian pekerjaan tertunda dari target waktu yang ditetapkan. Keterbatasan kemampuan juga memberikan andil tertundanya percepatan kegiatan dan bisa jadi pemahaman substansi kegiatan juga dapat berbeda dan pada akhirnya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dapat terganggu.

b. Alokasi anggaran yang kurang memadai

Komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan seringkali tidak dapat terealisasi seluruhnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya revisi terhadap program dan kegiatan yang diusulkan. Optimalisasi menjadi berkurang, disebabkan alokasi anggaran yang terbatas. Akibatnya, program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi kurang optimal dalam mencapai indikator kinerja yang diharapkan.

c. Sarana dan prasarana kerja yang terbatas

Kenyamanan kerja dan peningkatan kinerja sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan pra sarana yang ada. Hal ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan dan kelancaran program/kegiatan.

Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan tergantung adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menunjang secara langsung. Seringkali kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena dukungan sarana dan pra sarana yang kurang memadai. Pada akhirnya sasaran dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan tidak tercapai.

2. Hambatan Eksternal

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol antara lain :

- a. Masih banyaknya potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat diantaranya konflik perbatasan, lahan/tanah ulayat, dan Konflik Sumber Daya Alam
- b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat
- c. Masih adanya pemahaman toleransi yang berbeda antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan di daerah
- d. Masih tingginya tingkat kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, peredaran miras dan penularan HIV/AIDS, Geng Motor dan Pelecehan Seksual terhadap anak dan penyimpangan perilaku seksual (LGBT)
- e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum
- f. Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam pelaksanaan pembangunan.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional (NSPK, SPM dan SDG's).

Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah "*Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan*

Berkelanjutan’. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
- b. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah
- c. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- d. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
- e. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
- f. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
- g. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendukung misi ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Untuk mendukung misi 2 tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu **“Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat”** dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator “Konflik di Sumatera Barat ”
2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator “Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar”.
3. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun renja Badan Kesbangpol Tahun 2023.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Pada tahun 2021, rata-rata capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sebesar 241,3% dengan kategori sangat baik, sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel II.18
Rata-rata capaian kinerja program kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (80)	B(70,27)	87,84%
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Organisasi					87,84%
2	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah konflik diSumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas diSumbar	<5 5%	0 29,06%	200% 581,2%
Rata-rata Persentase Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat					390,6%
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	76	73	96,05%
Rata-rata Persentase Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat					96,05%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis					241,3%

Capaian kinerja program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung visi dan misi kepala daerah berimplikasi pada capaian program nasional. Visi Misi Kepala Daerah disusun dengan mengacu pada visi misi RPJMN 2020-2024 dimana visi RPJMN 2020-2024 adalah *"Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."* Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 9 misi yaitu : 1). *Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.* 2). *Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.* 3).

Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan. 4). Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan. 5). Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa. 6). Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya. 7). Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga. 8). Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. 9). Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai dengan visi pembangunan '*Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*, maka pembangunan nasional 2020-2024 akan diarahkan untuk mencapai 5 sasaran utama yang mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Adapun yang menjadi agenda pembangunan dalam kurun waktu 2020-2024 antara lain :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sangat berperan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel II.19
Sasaran, Target dan Indikator Menguatnya Stabilitas Polhunhankam
RPJMN 2020-2024

No	Sasaran	Baseline 2019	Target 2024
2. Sasaran Konsolidasi Demokrasi			
Indikator :			
A.	Indeks Demokrasi Indonesia	72,39 (2018)	78,37*
B.	Indeks Kerawanan Pemilu	49	39
6. Sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional			
Indikator :			
A.	Proporsi Orang Yang Aman Berjalan Sendirian (%)	53,32 (2017)	>60
B.	Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	N/A*	3,4
C.	Angka Kejadian Konflik	60	35
D.	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (^)	1,8	1,69
E.	Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 penduduk)	113 (2018)	111

Pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa salah satu agenda pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 adalah menguatnya stabilitas polhukhankam. Agenda pembangunan ini menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan diselaraskan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesbangpol selama 5 tahun ke depan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar yaitu meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan meningkatnya kualitas demokrasi di Sumbar. Sasaran ini didukung oleh program-program prioritas yaitu Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial, Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas.

Pada tahun 2021, jumlah konflik di Sumbar sebanyak 0 kasus, sedangkan pada tahun 2016 (baseline) sebanyak 4 kasus, artinya terjadi penurunan jumlah konflik di

Sumatera Barat dari tahun-tahun sebelumnya dan hal ini tentunya berimplikasi pada capaian sasaran pembangunan nasional. Untuk nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2021 sebesar 73, naik dari tahun 2019 (baseline). Kenaikan ini tentunya juga berimplikasi terhadap capaian sasaran pembangunan nasional.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kesbangpol Prov.Sumbar

a. Tantangan

Tantangan dalam peningkatan pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah :

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam menunjang kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar
- b) Pengalokasian anggaran yang memadai untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
- c) Meningkatkan kualitas sarana dan pra sarana kantor
- d) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam membangkitkan semangat nasionalisme.
- e) Meningkatkan rasa toleransi dalam kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
- f) Meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam berrpolitik
- g) Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga katentraman dan ketertiban daerah.
- h) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik
- i) Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian terhadap dokumen kegiatan

b. Peluang

- a) Adanya dukungan instansi terkait dalam melaksanakan tugas
- b) Adanya peningkatan dukungan kebijakan pemerintah / non pemerintah
- c) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- d) Adanya peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi di bidang kesatuan bangsa dan politik
- e) Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan maupun perguruan tinggi terhadap kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- f) Karakteristik masyarakat Sumatera Barat yang hidup berlandaskan falsafah 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah' masih menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan, sehingga kemajemukan yang ada dalam masyarakat Minangkabau masih bisa dikelola dengan baik
- g) Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, jajaran TNI serta pelibatan tokoh masyarakat dan ulama, senantiasa aktif bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar khususnya untuk meredam gejolak yang mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023.

Upaya mewujudkan stabilitas politik dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan tekad dan energi yang besar dan terencana. Pelibatan seluruh *stakeholders* dalam penjangkaran informasi maupun melakukan koordinasi adalah hal yang mutlak dilakukan. Jika kita melihat pada kondisi faktual, selalu ada saja pihak atau kelompok yang menginginkan adanya perpecahan dan memicu konflik. Dalam kerangka pemikiran ini, maka disusunlah analisis SWOT (*Strengthen, Weakness, Opportunities and Threads*) dalam merencanakan dan menjalankan strategi.

Pada tahun 2021, terkait dengan tugas dan fungsi Badan kesbangpol Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa isu yang memerlukan perhatian dan fokus pemerintah daerah yakni :

1. Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan perusahaan di sejumlah kabupaten/kota di Sumbar.
2. Masih tingginya angka kriminalitas dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Sumbar khususnya daerah perkotaan.
3. Maraknya isu *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT)* yang melanda Sumatera Barat, yang terus dalam pemantauan Badan Kesbangpol Sumbar bersama jajaran terkait.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi sehingga pelaksanaan pilkada langsung yang memberi peluang menguatnya politik aliran dalam kancah

politik di daerah.

5. Belum optimalnya peran tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam menangkal terjadinya konflik sosial;
6. Memudarnya wawasan kebangsaan di berbagai kalangan, khususnya generasi muda akibat pendidikan dan penanaman semangat kebangsaan yang sudah tidak sesuai;

Berdasarkan isu-isu strategis yang terjadi di sepanjang tahun 2021, penyelenggaraan tugas Badan Kesbangpol Prov. Sumbar untuk tahun 2023 difokuskan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung terciptanya stabilitas daerah Sumatera Barat dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran Kesbangpol dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.
2. Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini aparaturnya Kesbangpol melalui pemetaan :
 - Daerah rawan konflik sosial (pembuatan peta daerah rawan konflik berbentuk geospasial).
 - Isu terorisme (mewaspada kelompok radikal seperti ISIS dan lainnya)
 - Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.
 - Pengawasan terhadap orang atau lembaga asing
3. Mensinergikan perbedaan visi dan misi serta langkah dan sikap antar jajaran Kesbangpol pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui rapat kerja dan sosialisasi serta sinkronisasi kelembagaan.
4. Membentuk dan memberdayakan forum atau tim penanganan masalah bidang kesbangpol di kabupaten/kota seperti :
 - Tim penanganan masalah strategis daerah
 - Tim pengawasan orang asing
 - Tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat
 - Tim penelitian/verifikasi bantuan keuangan partai politik (khusus tingkat provinsi)
 - Forum kerukunan umat beragama
 - Forum kewaspadaan dini masyarakat
 - Forum pembauran kebangsaan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pagu anggaran pada penetapan Renja Kesbangpol Tahun 2023 sebesar Rp. 213.351.618.973,- (dua ratus tiga belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk pembiayaan program-program yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Prioritas alokasi usulan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat dan pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024.
2. Fasilitasi dukungan dana hibah untuk penyelenggara Pemilu dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.
3. Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
4. Fasilitasi kegiatan tim dan forum-forum strategis daerah dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan di Sumatera Barat.
5. Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Sumatera Barat.
6. Pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat
7. Pendidikan wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila dan pembentukan karakter kebangsaan.

Review terhadap penetapan RKPD tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat pada Badan Kesbangpol dapat dilihat pada lampiran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan Renja Tahun 2023, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 24 Februari Tahun 2022. Dari hasil Forum Perangkat Daerah ini diperoleh masukan maupun usulan kegiatan dari Kesbangpol kabupaten/kota dan stakeholder terkait yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk penyempurnaan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

Berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah diperoleh kesimpulan bahwa secara umum, perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah mengusulkan beberapa kegiatan prioritas yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah khususnya kegiatan yang memiliki dampak langsung terkait pembangunan masyarakat di daerah diantaranya penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat, pembinaan terhadap Ormas/LSM, penyuluhan pemberantasan narkoba, dan peningkatan kesadaran bela negara.

Pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilaksanakan secara lebih intensif dan berkesinambungan di daerah mengingat masih rendahnya angka partisipasi politik di daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pembinaan terhadap ormas juga penting dilaksanakan agar aktivitas dan keberadaan ormas yang ada di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pencegahan dan pemberantasan kasus maksiat dan penyalahgunaan narkoba khususnya bagi pelajar dan generasi muda di daerah juga menjadi hal prioritas yang perlu dilaksanakan di daerah, mengingat jumlah kasus maksiat dan angka penyalahgunaan narkoba di daerah masih sangat tinggi. Keterbatasan alokasi anggaran di daerah menyebabkan Kesbangpol Kab/kota tidak dapat melakukan sosialisasi bagi masyarakat di daerah secara maksimal dalam rangka pencegahan terhadap kasus maksiat dan penyalahgunaan narkoba di daerah sehingga Kesbangpol Kab/Kota mengharapkan agar Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut bagi masyarakat di daerah. Tingginya jumlah kasus maksiat dan angka penyalahgunaan narkoba di Sumbar juga menjadi isu strategis terkait tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sehingga usulan kegiatan ini diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan rancangan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

Adapun kegiatan peningkatan kesadaran bela negara perlu dilaksanakan di daerah mengingat semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam kehidupan bermasyarakat. Penyebabnya adalah melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme khususnya di kalangan generasi muda. Kesbangpol di daerah mengharapkan agar pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut di daerah dengan dukungan dana dari APBD Provinsi. Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan menurunnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan merupakan isu strategis terkait tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera

Barat, sehingga usulan kegiatan ini dituangkan dalam hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2021

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I				II												III				IV			
								(8)	(9)	(10)	(11)				(12) = 8+9+10+11									(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)		
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			0		0		14.991.266.918		0	0	0		10.759.323.319		10.759.323.319		71,77		10.759.323.319		inf								
	X	PENUNJANG URUSAN			0		0		7.498.380.732		0	0	0		5.586.177.170		5.586.177.170		74,50		5.586.177.170		inf								
	X.XX	PENUNJANG URUSAN			0		0		7.498.380.732		0	0	0		5.586.177.170		5.586.177.170		74,50		5.586.177.170		inf								
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	[?]		0		0	0	7.498.380.732		0	0	0	0	278.887.417.382	0	278.887.417.382	nan	3.719,30	0	278.887.417.382	nan	inf								
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	0	0	0	100	247.206.250	0	0	0	0	0	230.857.228	0	230.857.228	0,00	93,39	0	230.857.228	nan	inf							
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan (Rakor Kesbangpol se-Sumbar)	kali		0		0	1	112.769.350	0	0	0	0	1	111.930.328	1	111.930.328	100,00	99,26	1	111.930.328	inf	inf	KESBANGPOL						
			Dokumen Renstra dan Renja Badan Kesbangpol yang disusun	Dokumen					2						2		2	100,00		2		inf		KESBANGPOL							
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKT, PK, PK Perubahan, IKU)	Dokumen					6						6		6	100,00		6		inf		KESBANGPOL							
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan (Forum Perangkat Daerah dan Rakor Kesbangpol se-Sumbar)	kali		0		0	1	60.616.400	0	0	0	0	1	47.014.900	1	47.014.900	100,00	77,56	1	47.014.900	inf	inf	KESBANGPOL						
			RKA, RKA Pergeseran RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan	dokumen					6						6		6	100,00		6		inf		KESBANGPOL							
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIPLPPD,LKPJ, dan Laporan Tahunan yang disusun	dokumen		0		0	4	52.422.200	0	0	0	0	4	50.787.500	4	50.787.500	100,00	96,88	4	50.787.500	inf	inf	KESBANGPOL						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
									I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan	dokumen		0		0	4	21.398.300	0	0	0	4	21.124.500	4	21.124.500	100,00	98,72	4	21.124.500	inf	inf	KESBANGPOL			
			Dokumen Hasil Monev Kegiatan SKPD	Dokumen					1					1			100,00			1		inf		KESBANGPOL			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf					
Predikat Kinerja																					-	-					
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	bulan	0	0	0	0	12	4.993.471.914	0	0	0	0	0	4.219.638.662	0	4.219.638.662	0,00	84,50	0	4.219.638.662	nan	inf			
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	bulan		0		0	12	4.558.543.214	0	0	0	12	4.004.493.462	12	4.004.493.462	100,00	87,85	12	4.004.493.462	inf	inf	KESBANGPOL			
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengelola Sistem Informasi, Petugas PPHPK)	bulan		0		0	12	381.000.000	0	0	0	12	186.000.000	12	186.000.000	100,00	48,82	12	186.000.000	inf	inf	KESBANGPOL			
7	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan		0		0	1	17.006.000	0	0	0	1	7.454.000	1	7.454.000	100,00	43,83	1	7.454.000	inf	inf	KESBANGPOL			
8	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	laporan		0		0	13	36.922.700	0	0	0	0	21.691.200	0	21.691.200	0,00	58,75	0	21.691.200	nan	inf	KESBANGPOL			
			Laporan Aset Semesteran	laporan					2					0		0	0,00		0		nan		KESBANGPOL				
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	laporan					13					13		13	100,00		13		inf		KESBANGPOL				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf					
Predikat Kinerja																					-	-					
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	bulan	0	0	0	0	12	49.362.550	0	0	0	0	0	25.712.128	0	25.712.128	0,00	52,09	0	25.712.128	nan	inf			
			Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Bulan	0		0		12		0	0	0	0		0		0,00		0		nan					
9	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	menit		0		0	1031	34.800.000	0	0	0	1031	23.000.028	1031	23.000.028	100,00	66,09	1031	23.000.028	inf	inf	KESBANGPOL			
			Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	kwh					37146					37146		37146	100,00		37146		inf		KESBANGPOL				
			Rekening tagihan internet yang dibayarkan	bulan					12					12		12	100,00		12		inf		KESBANGPOL				
			Jasa Jaminan Kendaraan Dinas Operasional	unit					5					5		5	100,00		5		inf		KESBANGPOL				
			Rekening tagihan air yang dibayarkan	meter kubik					371					371		371	100,00		371		inf		KESBANGPOL				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																	
								I	II	III	IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)																											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
10	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jasa Jaminan Kendaraan Dinas Operasional	unit		0		0	7	14.562.550		0	0	0	7	2.712.100	7	2.712.100	100,00	18,62	7	2.712.100	inf	inf	KESBANGPOL																					
			Laporan Aset Tahunan	laporan					1						1		100,00		1			inf		KESBANGPOL																						
			Laporan Aset Semesteran	laporan					2						2		100,00		2			inf		KESBANGPOL																						
			Jasa Jaminan Gedung	unit					0						0		nan		0			nan		KESBANGPOL																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																														
Predikat Kinerja																																														
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	%	0	0	0	0	60	90.967.000	0	0	0	0	0	37.540.000	0	37.540.000	0,00	41,27	0	37.540.000	nan	inf																						
11	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	stel		0		0	76	51.300.000		0	0	0	38	28.500.000	38	28.500.000	50,00	55,56	38	28.500.000	inf	inf	KESBANGPOL																					
12	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan dan yang diikuti	kali		0		0	6	14.507.000		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	KESBANGPOL																					
13	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Kesbangpol yang mengikuti Bimtek	orang		0		0	12	25.160.000		0	0	0	12	9.040.000	12	9.040.000	100,00	35,93	12	9.040.000	inf	inf	KESBANGPOL																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																														
Predikat Kinerja																																														
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	Bulan	0	0	0	0	12	550.460.280	0	0	0	0	0	379.144.712	0	379.144.712	0,00	68,88	0	379.144.712	nan	inf																						
14	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	bulan		0		0	12	10.001.680		0	0	0	12	10.001.680	12	10.001.680	100,00	100,00	12	10.001.680	inf	inf	KESBANGPOL																					
15	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masker yang disediakan	kotak		0		0	250	62.770.100		0	0	0	144	12.154.100	144	12.154.100	57,60	19,36	144	12.154.100	inf	inf	KESBANGPOL																					
			Alat Tulis Kantor yang disediakan	bulan					12						12		12		100,00		12		inf		KESBANGPOL																					
			Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu	bulan					12						12		12		100,00		12		inf		KESBANGPOL																					
			Hand sanitizer yang disediakan	buah					200						96		96		48,00		96		inf		KESBANGPOL																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
								I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
16	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	bulan		0		0	12	30.000.000	0	0	0	12	24.165.000	12	24.165.000	100,00	80,55	12	24.165.000	inf	inf	KESBANGPOL			
17	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	jenis		0		0	5	16.440.000	0	0	0	5	13.700.000	5	13.700.000	100,00	83,33	5	13.700.000	inf	inf	KESBANGPOL			
18	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	bulan		0		0	12	431.248.500	0	0	0	12	319.123.932	12	319.123.932	100,00	74,00	12	319.123.932	inf	inf	KESBANGPOL			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf				
Predikat Kinerja																						-	-				
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	bulan	0	0	0	0	12	788.893.900	0	0	0	0	90.500.000	0	90.500.000	0,00	11,47	0	90.500.000	nan	inf				
19	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	unit	0		0		1	335.431.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	KESBANGPOL				
20	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebeleur yang diadakan	unit	0		0		24	62.305.400	0	0	0	2	11.000.000	2	11.000.000	8,33	17,65	2	11.000.000	inf	inf	KESBANGPOL			
21	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	0		0		33	391.157.500	0	0	0	33	79.500.000	33	79.500.000	100,00	20,32	33	79.500.000	inf	inf	KESBANGPOL			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	0	0	0	0	12	613.002.798	0	0	0	0	445.583.560	0	445.583.560	0,00	72,69	0	445.583.560	nan	inf				
22	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	kali		0		0	100	11.555.000	0	0	0	100	9.990.150	100	9.990.150	100,00	86,46	100	9.990.150	inf	inf	KESBANGPOL			
23	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	menit	0		0		1200	142.736.748	0	0	0	1720	114.489.948	1720	114.489.948	143,33	80,21	1720	114.489.948	inf	inf	KESBANGPOL			
			Rekening tagihan air yang dibayarkan	meter kubik					371					322		322		86,79		322		inf		KESBANGPOL			
			Rekening tagihan internet yang dibayarkan	bulan					12					12		12		100,00		12		inf		KESBANGPOL			
			Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	kwh					4000					37600		37600		940,00		37600		inf		KESBANGPOL			
24	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Sopir Kantor	bulan		0		0	12	458.711.050	0	0	0	12	321.103.462	12	321.103.462	100,00	70,00	12	321.103.462	inf	inf	KESBANGPOL			
			Jasa Kebersihan Kantor	bulan					12					12		12		100,00		12		inf		KESBANGPOL			
			Jasa Pengamanan Kantor	bulan					12					12		12		100,00		12		inf		KESBANGPOL			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I				II												III				IV			
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
			Jasa Kesehatan Rohani	kali			2					0		0		0,00		0		nan	KESBANGPOL										
			Jasa Rohaniwan	kali			2					2		2		100,00		2		inf	KESBANGPOL										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	inf														
Predikat Kinerja																-	-														
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	bulan	0	0	0	0	12	165.016.040	0	0	0	0	0	157.200.880	0	157.200.880	0,00	95,26	0	157.200.880	nan	inf							
25	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit		0		0	7	124.406.050	0	0	0	7	116.656.280	7	116.656.280	100,00	93,77	7	116.656.280	inf	inf	KESBANGPOL							
26	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang direhab	m2		0		0	13	15.199.990	0	0	0	13	15.135.000	13	15.135.000	100,00	99,57	13	15.135.000	inf	inf	KESBANGPOL							
27	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	unit		0		0	37	25.410.000	0	0	0	37	25.409.600	37	25.409.600	100,00	100,00	37	25.409.600	inf	inf	KESBANGPOL							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																inf	inf														
Predikat Kinerja																-	-														
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				0		0		7.492.886.186	0	0	0		5.173.146.149		5.173.146.149		69,04		5.173.146.149	inf									
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				0		0		7.492.886.186	0	0	0		5.173.146.149		5.173.146.149		69,04		5.173.146.149	inf									
8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	[?]			0		0	0	1.253.697.539	0	0	0	0	315.531.010	0	315.531.010	nan	25,17	0	315.531.010	nan	inf								
8.01.06.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat	%	0	0	0	0	80	1.253.697.539	0	0	0	0	100	315.531.010	100	315.531.010	125,00	25,17	100	315.531.010	inf	inf	Target yang ditetapkan 80% dengan asumsi terjadi konflik di Sumbang pada tahun 2021, namun realisasinya sampai saat ini tidak ada konflik sehingga pencapaiannya 100%	Fungsi intelijen dalam melaksanakan fungsi deteksi dan cegah dini terhadap potensi konflik di yang berkembang tengah masyarakat dapat berjalan dengan baik					
1	8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rapat Pemantauan Orang Asing (POA)	kali		0		0	2	168.944.200	0	0	0	2	28.281.200	2	28.281.200	100,00	16,74	2	28.281.200	inf	inf	KESBANGPOL	Adanya dukungan dari anggota tim Pemantauan Orang Asing untuk melaksanakan rapat sesuai schedule						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Rakor FKDM	kali					0						0		0		nan		0		nan	KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan anggaran karena kegiatan ini merupakan penunjang kegiatan prioritas		
			Koordinasi dan pengumpulan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah	kab/kota					19						19		19		100,00		19		inf	KESBANGPOL		Adanya koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota	
			Rapat tim Pemantauan Orang Asing (POA)	kali					4						2		2		50,00		2		inf	KESBANGPOL	Target kegiatan dikurangi pada perubahan anggaran karena adanya kebijakan PPKM level 4 di Kota Padang yang membatasi kegiatan berupa pertemuan atau tatap muka	Adanya pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Padang yang membatasi kegiatan yang bersifat tatap muka atau mengundang banyak orang	
			Rapat tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)	kali					4						2		2		50,00		2		inf	KESBANGPOL		Adanya pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Padang yang membatasi kegiatan yang bersifat tatap muka atau mengundang banyak orang	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Rapat tim FKDM	kali					6						3		3		50,00		3		inf	KESBANGPOL	Target kegiatan dikurangi pada perubahan anggaran karena adanya kebijakan PPKM level 4 di Kota Padang yang membatasi kegiatan berupa pertemuan atau tatap muka	Adanya pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Padang yang membatasi kegiatan yang berisifat tatap muka atau mengundang banyak orang	
			Rapat tim Forkopimda	kali					1						0		0		0,00		0		nan	KESBANGPOL	Indikator sub kegiatan dipindahkan ke sub kegiatan forkopimda karena adanya pemutakhiran sub kegiatan pada P.90 tahun 2019	Dukungan dari anggota tim Forkopimda untuk mengagendakan rapat tim secara berkala	
			Rakor Timdu PKS	kali					0						0		0		nan		0		nan	KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan anggaran karena kegiatan ini merupakan penunjang kegiatan prioritas	Adanya dukungan anggota timdu PKS untuk menschedulkan rapat tumdu PKS tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
								I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
			Rapat Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	kali			4							2		2		50,00		2		inf	KESBANGPOL	Target kegiatan dikurangi pada perubahan anggaran karena adanya kebijakan PPKM level 4 di Kota Padang yang membatasi kegiatan berupa pertemuan atau tatap muka	Adanya pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Padang yang membatasi kegiatan yang bersifat tatap muka atau mengundang banyak orang		
			Rapat Timdu Penanganan Konflik Sosial (PKS)	kali			3							3		3		100,00		3		inf	KESBANGPOL		Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk melaksanakan rapat tim sesuai schedule		
2	8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lambaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Monitoring Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab/kota	kab/kota	0	0	19	342.501.600	0	0	0	19	194.508.446	19	194.508.446	100,00	56,79	19	194.508.446	inf	inf	KESBANGPOL		Adanya dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait rencana aksi tmdu PKS Kab/Kota			
			Monitoring Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial ka/kota	kab/kota			19						0		0	0,00		0		nan	KESBANGPOL	Indikator terinput 2 kali					
			Monitoring isu strategis di daerah dan pelaksanaan Forkopimda kab/kota	kab/kota			19						19		19	100,00		19		inf	KESBANGPOL		Adanya dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait isu strategis di daerah				
			Laporan rencana aksi	laporan			3						3		3	100,00		3		inf	KESBANGPOL		Dukungan SDM yang memadai dalam penyusunan laporan rencana aksi				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
					I	II	III		IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
			Buku pemetaan potensi konflik di daerah	buku					1						1		1		100,00		1		inf		KESBANGPOL		Dukungan SDM yang memadai dalam penyusunan buku pemetaan potensi konflik
			Monitoring potensi konflik sosial di daerah	kab/kota					19						19		19		100,00		19		inf		KESBANGPOL		Adanya dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait potensi konflik di daerah
			Monitoring keberadaan orang asing di daerah	kab/kota					19						19		19		100,00		19		inf		KESBANGPOL		Adanya dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait keberadaan orang asing di daerah
			Monitoring masalah strategis daerah	kab/kota					19						19		19		100,00		19		inf		KESBANGPOL		Adanya dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait isu strategis di daerah
			Monitoring potensi penyebaran radikalisme dan potensi aksi teror di daerah	kab/kota					19						19		19		100,00		19		inf		KESBANGPOL		Adanya dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait penyebaran radikalisme dan potensi aksi tetor di daerah
3	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rapat tim Forkopimda	kali		0		0	6	742.251.739	0	0	0	6	92.741.364	6	92.741.364	100,00	12,49	6	92.741.364	inf	inf	KESBANGPOL		Adnya dukungan dari anggota tim forkopimda untuk mengikuti rapat sesuai schedule	
			Monitoring isu strategis di daerah dan pelaksanaan Forkopimda Kab/Kota	kab/kota					19						19		19		100,00		19		inf		KESBANGPOL		Adanya dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait isu strategis di daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
								I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Rakor Forkopimda	Kali			1						0		0		0,00	0	nan	KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan anggaran karena adanya kebijakan PPKM level 4 di Kota Padang yang membatasi kegiatan berupa pertemuan atau tatap muka	Adanya pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Padang yang membatasi kegiatan yang bersifat tatap muka atau mengundang banyak orang				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	inf			
Predikat Kinerja																						-	-			
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	[?]		0	0	0	182.019.300	0	0	0	0	57.780.900	0	57.780.900	nan	31,74	0	57.780.900	nan	inf					
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	%	0	0	0	80	182.019.300	0	0	0	0	80	57.780.900	80	57.780.900	100,00	31,74	80	57.780.900	inf	inf			Adanya dukungan dari pimpinan untuk memantau semua sktifas atau keberadaan ormas di daerah
1	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah DPD Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara Prov Sumbar yang terealisasi	%	0	0	100	149.119.600	0	0	0	0	31.176.800	0	31.176.800	0,00	20,91	0	31.176.800	nan	inf	KESBANGPOL	Kegiatan bukan merupakan kegiatan prioritas tahun 2021	Tidak adanya dukungan anggaran		
			Sosialisasi Peraturan tentang Keormasan	Kali			1					0		0	0,00	0	nan	KESBANGPOL		Dukungan anggaran yang tidak memadai						
			Hibah PWRI yang terealisasi	%			100					100		100	100,00	100	inf	KESBANGPOL		Adanya kerjasama yang baik dari pihak yang mengajukan hibah untuk melengkapi dokumen pencairan hibah sesuai ketentuan yang berlaku						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(outpu)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
								I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Ormas	Kali			2						1		1	50,00	1	inf	KESBANGPOL	Kegiatan ini merupakan unsur penunjang sehingga target dikurangi untuk mengakomodir refocusing anggaran	Dukungan anggaran yang kurang memadai				
2	8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Monitoring keberadaan dan aktivitas ormas di Daerah	Kab/Kota	0	0	19	32.899.700	0	0	0	19	26.604.100	19	26.604.100	100,00	80,86	19	26.604.100	inf	inf	KESBANGPOL	Adanya koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota dalam memberikan data dan informasi terkait aktifitas dan keberadaan ormas di daerah		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		nan	inf						
Predikat Kinerja																		-	-						
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	[?]		0	0	0	1.502.157.700	0	0	0		683.942.079	0	683.942.079	nan	45,53	0	683.942.079	nan	inf				
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang idiologi radikal dan isu separatisme di daerah	%	0	0	0	0	80	1.502.157.700	0	0	0	0	80	683.942.079	80	683.942.079	100,00	45,53	80	683.942.079	inf	inf	Adanya dukungan dari pimpinan untuk memantau setiap gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal isi separatisme di daerah
1	8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	kali	0	0	0	585.315.050	0	0	0	0	488.655.850	0	488.655.850	nan	83,49	0	488.655.850	nan	inf	KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan		
			Hibah PD PPAD Sumbar yang terealisasi	%			100					0		0		0,00	0		nan	KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan karena dianggap belum prioritas tahun 2021	Tidak ada dukungan anggaran			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pelatihan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	kali			0					0		0		nan	0	nan	KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan				
			Rapat Tim Forum Pembauran Kebangsaan	kali			1					2		2		200,00	2	inf	KESBANGPOL	Adanya kebijakan pimpinan untuk melaksanakan rapat yang dianggap strategis	Adanya dukungan dari pimpinan dan anggota tim FPK untuk melaksanakan rapat tum sesuai schedule			
			Hibah DHD 45 yang terealisasi	%			100					100		100		100,00	100	inf	KESBANGPOL	Adanya kerjasama yang baik dari pihak yang mengajukan hibah untuk melengkapi dokumen pencairan hibah sesuai ketentuan yang berlaku				
			Pendidikan Wawasan Kebangsaan	kali			3					3		3		100,00	3	inf	KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan	Dukungan anggaran yang memadai dan komitmen pimpinan untuk mensukseskamm pelaksanaan kegiatan			
			Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	kali			3					3		3		100,00	3	inf	KESBANGPOL	Dukungan anggaran yang memadai dan komitmen pimpinan untuk mensukseskamm pelaksanaan kegiatan				
			Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	kali			0					0		0		nan	0	nan	KESBANGPOL					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
								I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
2	8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Hasil Koordinasi Bidang Ideologi dan Karakter Bangsa	Dokumen	0	0	5	753.009.900	0	0	0	5	94.410.079	5	94.410.079	100,00	12,54	5	94.410.079	inf	inf	KESBANGPOL	Komitmen pimpinan untuk melakukan koordinasi yang baik terkait masalah ideologi dan karakter bangsa
			Rapat Tim Forum Pembauran kebangsaan	kali			0					0		0	nan		0	nan	nan	KESBANGPOL	arget kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan	Dukungan anggaran yang tidak memadai	
			Rapat Tim	kali			2					2		2	100,00		2	inf	KESBANGPOL		Adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan untuk melaksanakan rapat sesuai yang ditargetkani		
			Jumlah Koordinasi di Bidang Ideologi dan Karakter Bangsa	Kali			5					5		5	100,00		5	inf	KESBANGPOL		Adanya dukungan memadai dari pihak terkait dalam melakukan koordinasi		
			Monitoring Permasalahan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di Daerah	kab/kota			19					19		19	100,00		19	inf	KESBANGPOL		Dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait permasalahan ideologi wasbang di daerah		
			Honorarium Tim Forum Pembauran Kebangsaan Prov. Sumbar	Bulan			1					0		0	0,00		0	nan	KESBANGPOL	arget kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan	Tidak adanya dukungan anggaran untuk pembayaran honor tim		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
									I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
3	8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rapat Tim	kali		0		0	1	163.832.750	0	0	0	1	100.876.150	1	100.876.150	100,00	61,57	1	100.876.150	inf	inf	KESBANGPOL			Adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan untuk melaksanakan rapat sesuai schedule	
			Monitoring Permasalahan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di Daerah	kab/kota					19					19		19		100,00		19		inf		KESBANGPOL			Dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait permasalahan ideologi wasbang di daerah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf				
Predikat Kinerja																							-	-				
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	[?]			0		0	0	3.488.791.897	0	0	0	0	3.379.916.384	0	3.379.916.384	nan	96,88	0	3.379.916.384	nan	inf					
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis	%	0	0	0	0	80	3.488.791.897	0	0	0	0	80	3.379.916.384	80	3.379.916.384	100,00	96,88	80	3.379.916.384	inf	inf			Adanya kegiatan pendidikan politik yang berkesinambungan bagi masyarakat	
1	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Verifikasi Berkas Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota	%		0		0	100	3.413.316.897	0	0	0	100	3.306.551.611	100	3.306.551.611	100,00	96,87	100	3.306.551.611	inf	inf	KESBANGPOL			Adanya kerjasama yang baik dari anggota DPRD kab/kota yang mengalami pergantian antar waktu untuk melengkapi persyaratan pengajuan PAW sesuai ketentuan yang berlaku	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp			
			Jumlah Partai Politik yang di verifikasi	Partai					9						9		9		100,00		9		inf	KESBANGPOL			Adanya kerjasama yang baik dari pengurus parpol untuk melengkapi dokumen pengajuan bantuan keuangan parpol sesuai ketentuan yang berlaku				
			Pendidikan Politik Masyarakat	kali					4						6		6		150,00		6		inf	KESBANGPOL	Kegiatan ini merupakan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Prov Sumbar		Adanya dukungan dari anggota DPRD Prov Sumbar dalam bentuk pokok-pokok pikiran untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat				
			Hibah Bantuan Keuangan Parpol yang terealisasi	%					100						100		100		100,00		100		inf	KESBANGPOL			Adanya kerjasama yang baik dari pihak yang mengajukan hibah dalam melengkapi dokumen pencairan hibah sesuai ketentuan yang berlaku				
			Bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik	kali					1						0		0		0,00		0		nan	KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan	Dukungan anggaran yang tidak memadai					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I	II	III	IV																	
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			Rapat Tim Pokja IDI Sumbar	kali				2				0		0		0,00		0		nan	KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan	Dukungan anggaran yang tidak memadai					
2	8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Monitoring Perkembangan Politik Daerah	Kab/Kota	0		0	19	75.475.000	0	0	0	19	73.364.773	19	73.364.773	100,00	97,20	19	73.364.773	inf	inf	KESBANGPOL			Adanya dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait perkembangan politik daerah		
			Monitoring tahapan dan penyelenggaraan Pemilu (Perkembangan Politik Daerah)	Kab/Kota				19				19		19		100,00		19		inf	KESBANGPOL			Adanya dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait perkembangan politik di daerah				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															nan	inf												
Predikat Kinerja															-	-												
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	[?]		0		0	0	1.066.219.750	0	0	0	80	735.975.776	80	735.975.776	inf	69,03	80	735.975.776	inf	inf						
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat	%	0	0	0	0	80	1.066.219.750	0	0	0	0	80	735.975.776	80	735.975.776	100,00	69,03	80	735.975.776	inf	inf			Adanya kegiatan sosialisasi pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat	
1	8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosialisasi Narkoba	kali		0		0	0	601.700.850	0	0	0	0	555.709.563	0	555.709.563	nan	92,36	0	555.709.563	nan	inf	KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp					K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
			Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat (PEKAT)	kali					1						0		0		0,00		0		nan	KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan	Dukungan anggaran yang tidak memadai	
			Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	kali					0						0		0		nan		0		nan	KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan	Tidak didukung anggaran yang memadai	
			Sosialisasi tentang P4GN	kali					8						8		8		100,00		8		inf	KESBANGPOL		Adanya dukungan dari anggota DPRD Prov Sumbar dalam bentuk pokok-pokok pikiran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang P4GN	
2	8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosialisasi PAKEM (Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat)	Kali		0		0	0	428.244.000	0	0	0	0	150.552.263	0	150.552.263	nan	35,16	0	150.552.263	nan	inf	KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
								I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
			Rapat Tim Ketahanan Ekonomi	kali			0							0		0		nan		0		nan		KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan		
			Rakor Tim FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	kali			4							0		0		0,00		0		nan		KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan	Adanya refocusing anggaran	
			Dialog Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Pra Kelembagaan FKUB	Kab/Kota			2							2		2		100,00		2		inf		KESBANGPOL			dukungan dari kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan sesuai target
			Rakor Teknis Kesbangpol dg FKUB Provinsi serta FKUB dan Kesbangpol Kab/Kota	kali			1							0		0		0,00		0		nan		KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan	Adanya refocusing anggaran	
			Rakor FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	kali			0							0		0		nan		0		nan		KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan	Adanya refocusing anggaran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Dialog Tokoh Masyarakat dalam Pra Kelembagaan	kali					2						2		2		100,00		2		inf		KESBANGPOL			Dukungan dari kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan sesuai target
			Koordinasi dan Pengumpulan Informasi terhadap upaya peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah	Kab/Kota					19						19		19		100,00		19		inf		KESBANGPOL			Adanya dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait kerukunan umat beragama di daerah
			Rakor Ketahanan Ekonomi	kali					0						0		0		nan		0		nan		KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan	Dukungan anggaran yang tidak memadai	
			Rakor Evaluasi dan Antisipasi Kesiapan Pelaksanaan NATARU	kali					1						0		0		0,00		0		nan		KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan	Adanya refocusing anggaran	
			Rapat Tim FKUB (Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama)	kali					4						0		0		0,00		0		nan		KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan	Adanya refocusing anggaran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
									I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Rapat Antisipasi Kerukunan Kesbangpol dg Pengurus FKUB	kali					4					0		0		0,00		0	nan	KESBANGPOL	Target kegiatan dihilangkan pada perubahan karena merupakan indikator penunjang pencapaian sub kegiatan	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM untuk melaksanakan kegiatan	
			Rapat Periodek Kesbangpol dg Pengurus FKUB	kali					12					4		4		33,33		4	inf	KESBANGPOL	Target kegiatan dikurangi pada perubahan karena adanya kebijakan PPKM level 4 di Kota Padang yang membatasi pertemuan yang bersifat tatap muka	Adanya komitmen yang tinggi dari anggota tim FKUB untuk melaksanakan rapat secara berkala	
3	8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Monitoring Perkembangan Kasus Maksiat di Daerah	Kab/Kota		0		0	19	36.274.900	0	0	0	19	29.713.950	19	29.713.950	100,00	81,91	19	29.713.950	inf	inf	KESBANGPOL	Adanya dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait ketahanan ekonomi,sosial, budaya di daerah
			Monitoring Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Kab/Kota					19					19		19		100,00		19	inf	KESBANGPOL	Adanya dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait aliran kepercayaan yang ada di daerah		
			Monitoring potensi konflik antar Umat Beragama	Kab/Kota					19					19		19		100,00		19	inf	KESBANGPOL	Adanya dukungan dari kabupaten/kota untuk meberikan informasi terkait potensi konflik antar umat beragama di daerah		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
								I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Monitoring potensi Konflik akibat gejala ekonomi di Sumbar	Kab/Kota					19						19		100,00		19		inf		KESBANGPOL			Adanya dukungan dari kabupaten/kota untuk memberikan informasi terkait potensi konflik akibat gejala ekonomi di daerah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	inf				
Predikat Kinerja																						-	-				

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional****A. Telaahan terhadap RPJMN Tahun 2020-2024**

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, pemerintah telah menyusun RPJMN 2020-2024. Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah ***"Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."*** Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 9 misi yaitu : 1). *Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.* 2). *Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.* 3). *Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan.* 4). *Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.* 5). *Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.* 6). *Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.* 7). *Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.* 8). *Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.* 9). *Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.*

Sesuai dengan visi pembangunan *Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong* maka Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Adapun yang menjadi agenda pembangunan dalam kurun waktu 2020-2024 antara lain :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sangat berperan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam. Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program diantaranya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial, Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas

B. Arah Kebijakan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

Visi Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun ke depan adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut: 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri. 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3)

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

(1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.

(2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Dari keempat sasaran tersebut, sasaran meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2) dan sasaran meningkatnya kewaspadaan nasional merupakan tanggung jawab dari Ditjen Polpum.

2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.

2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.

3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.

4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

(1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.

(4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

(5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.

- (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
- (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:

- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Pengawasan Internal.
 - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa yang merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum), melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
- 5) Penghayatan, pengamalan, pembumih nilai-nilai ideologi Pancasila.
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial.
- 8) Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.
- 9) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Adapun tujuan, sasaran, target dan indikator capaian kinerja sasaran strategis untuk mencapai tujuan pertama (I) yang merupakan tanggung jawab dari Ditjen Polpum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Target dan Indikator Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ditjen Polpum Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target	
			2020	2024
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa			
	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.			
	1) Indeks Demokrasi Indonesia.	72,39 (IDI 2018)	77,36	78,66
	2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.	75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai

				RPJMN 2020- 2024)
	3) Indeks Kinerja Ormas	N/A	-	Nilai 70
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.			
	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40
	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,01 (2018)	67,1	67,5
	3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885
	3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,305	Nilai 2,310	Nilai 2,330
	c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.			
	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-	64

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyusun 1 program yaitu Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum dengan sasaran program yaitu :

- 1) Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi, dengan indikator kinerja program :
 - a) Indeks Demokrasi Indonesia
 - b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu
 - c) Indeks Kinerja Ormas
- 2) Simpul Strategis Pembumih Pancasila Berjalan Optimal, dengan indikator kinerja program :
 - a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
 - b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
 - c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonom
 - d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
- 3) Aparatur Pusat dan Daerah, Timdu Penanganan Konflik Sosial yang Mampu Melaksanakan secara Optimal Deteksi Dini dan Cegah Dini Serta Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, dengan indikator kinerja program :
 - a) Persentase Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah secara efektif

- b) Jumlah aparaturnya pusat dan daerah yang mampu melaksanakan deteksi dini dan cegah dini

Program ini dijabarkan dalam 6 kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
- b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri
- c. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
- e. Bina Idiologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Polpum

Penyusunan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah megacu pada program dan kegiatan kegiatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026

C. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 (tahap keempat). Adapun visi jangka menengah daerah dari kepala daerah terpilih adalah : ***"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan."***

Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengatahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS-SBK
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekoomi digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta berkualitas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, salah satu lembaga Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pendukung tugas pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bertanggung jawab dalam pelaksanaan misi kedua yaitu **"Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS-SBK"**

Untuk mendukung misi 2 tersebut, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK. Dengan pelaksanaan prinsip-prinsip revolusi mental, pengamalan ajaran agama yang baik dan penerapan adat dan budaya Minangkabau yang intensif di tengah kehidupan masyarakat, diharapkan akan dicapai :

1. Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja yang tinggi dan produktif
2. Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran dan cinta damai
3. Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi
4. Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat
5. Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau
6. Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat
7. Penurunan perbuatan maksiat.

Kondisi di atas merupakan isu-isu strategis yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 yang memuat program dan kegiatan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi
2. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi
3. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan di sini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tujuan Pertama : Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Tujuan Kedua : Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat

Untuk uraian lebih lengkap mengenai tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel III.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke	
					2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(9)	(10)
1	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	74,14	74,64

	melayani	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	organisasi			
2	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3	2
			Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,50	68,75

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023

1) Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Penyusunan program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Program dan kegiatan disusun untuk pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2021 – 2026.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada sasaran 1 misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu Meningkatnya Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah ABS SBK. Program urusan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang sasaran ini adalah :

- a. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial

- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dan
- e. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas

2) Uraian garis besar program dan kegiatan.

Pada tahun 2023, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat merencanakan 1 program pokok yang terdiri dari 8 kegiatan dengan 37 sub kegiatan dan 5 program urusan yang terdiri dari 5 kegiatan dengan 16 sub kegiatan.

Adapun 5 program urusan tersebut adalah :

a. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator program ini adalah skor indeks ketahanan nasional gatra ideologi. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung capaian program ini yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Adapun sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial

Indikator program ini adalah Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung capaian program

ini yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan indikator jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Adapun sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
5. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Indikator program ini adalah Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung capaian program ini yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Adapun sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Indikator program ini adalah Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung capaian program ini yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik. Adapun sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan,

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

e. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas

Indikator program ini adalah persentase ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung capaian program ini yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Adapun sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Sebaran lokasi program dan kegiatan tahun 2023 secara umum tersebar di 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Kegiatan yang dilaksanakan secara umum dalam bentuk sosialisasi/pelatihan, verifikasi dokumen, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan forum-forum strategis daerah, pemantuan ke lapangan, pemberian dana hibah, dan pembinaan ke kabupaten/kota se-Sumatera Barat terkait tugas dan fungsi Kesbangpol di daerah.

Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menunjang program kerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp. 213.351.618.973,- (dua ratus tiga belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada BAB IV.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN**

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 6 program
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 adalah sebanyak 13 kegiatan dengan 53 sub kegiatan.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 secara total sebesar Rp. 213.351.618.973,- (dua ratus tiga belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tertuang pada table berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									213,351,618,973		15,187,623,881		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									7,313,681,644		7,587,623,881		
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									295,000,000		350,000,000		
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Terwujudnya Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	160,000,000
8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Terwujudnya Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		100 %	6 Dokumen	100 %	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	80,000,000
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Terwujudnya Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		100 %	4 Dokumen	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	60,000,000
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Terwujudnya Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		100 %	19 Dokumen	100 %	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	50,000,000
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4,818,099,881			4,853,933,881	
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Terwujudnya tertib administrasi keuangan		100 %	38 Orang	100 %	4,515,933,881			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	4,515,933,881
8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Terwujudnya tertib administrasi keuangan		100 %	11 Orang	100 %	230,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	250,000,000
8	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Terwujudnya tertib administrasi keuangan		100 %	12 Dokumen	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	20,000,000
8	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Terwujudnya tertib administrasi keuangan		100 %	1 Dokumen	100 %	17,006,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	18,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	JJumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Terwujudnya tertib administrasi keuangan		100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	15,000,000
8 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran yang disiapkan	Terwujudnya tertib administrasi keuangan		100 %	18 Dokumen	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	35,000,000
8 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								38,800,000				42,000,000	
8 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BMD yang diasuransikan	Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah		100 %	5 Unit	100 %	28,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	30,000,000
8 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah		100 %	12 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	12,000,000
8 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								138,500,000				167,000,000	
8 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur		100 %	38 stel	100 %	28,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	30,000,000
8 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur		100 %	5 Dokumen 2 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	12,000,000
8 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur		100 %	8 Orang	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	35,000,000
8 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur		100 %	12 orang	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	30,000,000
8 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah bimtek yang diikuti	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur		100 %	7 kali	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	60,000,000
8 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								604,931,700				670,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Terwujudnya tertib administrasi umum		100 %	9 Jenis	100 %	9,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	10,500,000
8 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah CCTV yang disediakan Jumlah infocus yang disediakan	Terwujudnya tertib administrasi umum		100 %	1 set 1 unit	100 %	57,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	60,000,000
8 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah AC split yang disediakan	Terwujudnya tertib administrasi umum		100 %	2 Unit	100 %	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	14,000,000
8 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Perabot Kantor, Cendera Mata, Makan Minum Tamu) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah rapat koordinasi internal Perangkat Daerah yang dilakukan	Terwujudnya tertib administrasi umum		100 %	6 Jenis 0 Paket 6 Kali	100 %	72,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	75,000,000
8 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Terwujudnya tertib administrasi umum		100 %	7 jenis	100 %	30,348,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	37,000,000
8 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah surat kabar yang disediakan	Terwujudnya tertib administrasi umum		100 %	147 eksemplar	100 %	16,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	17,000,000
8 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Terwujudnya tertib administrasi umum		100 %	12 dokumen	100 %	401,543,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	450,000,000
8 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang dikelola	Terwujudnya tertib administrasi umum		100 %	200 Arsip	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	7,000,000
8 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								431,900,000				485,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Terwujudnya Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	1 Unit	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	100 %	320,000,000
8 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	Jumlah mebel	Terwujudnya Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	10 unit	100 %	41,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	100 %	45,000,000
8 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru (P.C unit, laptop dan printer)	Terwujudnya Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	5 Unit	100 %	55,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	100 %	80,000,000
8 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Garase)	Terwujudnya Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	1 Unit	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	100 %	40,000,000
8 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								596,450,063					604,000,000
8 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Terwujudnya Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	150 surat	100 %	10,355,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	100 %	11,000,000
8 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	Terwujudnya Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1000 mbps 4 rekening 290 mater kubik 37000 Kwh	100 %	139,841,748	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	100 %	143,000,000
8 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Terwujudnya Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	11 Orang	100 %	446,253,315	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	100 %	450,000,000
8 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								390,000,000					415,190,000
8 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1 Unit	100 %	39,190,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	39,190,000
8 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah		100 %	6 Unit	100 %	110,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan	100 %	120,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	provinsi		daerah								pemerintahan daerah provinsi		
8 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	48 Unit	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	40,000,000
8 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelilihara/rehab (ruang rapat dan ruang kerja Kepala Badan	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	2 Unit	100 %	195,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	196,000,000
8 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lannya yang dipelihara/rehab (Pagar)	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1 Unit	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	20,000,000
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								2,078,571,000					330,000,000
8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								2,078,571,000					330,000,000
8 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa		2,72 nilai	360 Orang	100 %	1,938,571,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	2,72 nilai	150,000,000
8 01 02 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa		2,72 nilai	80 Orang	100 %	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	2,72 nilai	100,000,000
8 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa		2,72 nilai	1 Laporan	100 %	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	2,72 nilai	80,000,000
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								193,999,013,973					3,680,000,000
8 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								193,999,013,973					3,680,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
 Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terwujudnya etika dan budaya politik yang demokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku		3,28 Nilai	200 Orang	100 %	193,849,013,973	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,28 Nilai	3,500,000,000
8 01 03 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terwujudnya etika dan budaya politik yang demokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku		3,28 Nilai	70 Orang	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,28 Nilai	120,000,000
8 01 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terwujudnya etika dan budaya politik yang demokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku		3,28 Nilai	1 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,28 Nilai	60,000,000
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								1,580,357,000					150,000,000
8 01 04 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								1,580,357,000					150,000,000
8 01 04 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terwujudnya harmonisasi ormas dan pemerintah		100 %	60 Orang	100 %	1,550,357,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	100 %	80,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 04 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terwujudnya harmonisasi ormas dan pemerintah		100 %	50 Orang	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	100 %	30,000,000
8 01 04 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terwujudnya harmonisasi ormas dan pemerintah		100 %	1 Laporan	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	100 %	40,000,000
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								1,780,828,000					330,000,000
8 01 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								1,780,828,000					330,000,000
8 01 05 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terwujudnya stabilitas di bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama		3,11 Nilai	100 Orang	100 %	1,588,571,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3,11 Nilai	150,000,000
8 01 05 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terwujudnya stabilitas di bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama		3,11 Nilai	50 Orang	100 %	142,257,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3,11 Nilai	120,000,000
8 01 05 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terwujudnya stabilitas di bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama		3,11 Nilai	1 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3,11 Nilai	60,000,000
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								6,599,167,356					3,110,000,000
8 01 06 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								6,599,167,356					3,110,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 06 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di Sumatera Barat		3,02 Nilai	120 Orang	100 %	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,02 Nilai	100,000,000
8 01 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di Sumatera Barat		3,02 Nilai	130 Orang	100 %	3,700,487,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,02 Nilai	150,000,000
8 01 06 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di Sumatera Barat		3,02 Nilai	4 Laporan	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,02 Nilai	160,000,000
8 01 06 1.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di Sumatera Barat		3,02 Nilai	6 Dokumen	100 %	2,668,680,356	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,02 Nilai	2,700,000,000
TOTAL									213,351,618,973				15,187,623,881	

BAB V**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Output Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah Program Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

1.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kewenangan sebagai OPD Provinsi yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

1.2 Rencana Tindak Lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang, Juli 2022



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA
BADAN KESBANGPOL
Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651212 199112 1 001